

6349
SEP
P a



DOSEN MUDA

LAPORAN PENELITIAN

**PENGEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENGATURAN
PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MENUNJANG
KONSERVASI HUTAN DI JAWA TENGAH**

Oleh :

**L. Tri Setyawanta. R. SH.MH.
Budi Ispriyarso, SH. MHum.
Nanik Trihastuti, SH. MHum.**

**Dibiayai Oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Nomor : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003 tanggal 28 Maret 2003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Doff: 2700/KI/TH/03

RINGKASAN

PENGEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENGATURAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MENUNJANG KONSERVASI HUTAN DI JAWA TENGAH (L. Tri Setyawanta. R, Budi Ispriyarso, Nanik Trihastuti : 2003, 70 halaman).

Program perhutanan sosial yang pada hakekatnya merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan perlu untuk dikaji ulang mengenai dasar-dasar pengaturannya. Hal itu disebabkan adanya perkembangan mengenai asas-asas hukum dan pengaturan peran serta masyarakat di bidang kehutanan yang merupakan landasan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Demikian pula perlu adanya upaya-upaya untuk mengembangkan peran serta masyarakat di bidang kehutanan dalam era desentralisasi dan otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan asas-asas hukum dan pengaturan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan, yang tercermin dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, khususnya di Jawa Tengah dalam kaitannya dengan konservasi hutan. Demikian pula untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengambilan sample dilakukan dengan metode non random sampling. Spesifikasi penelitiannya bersifat dekriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai bentuk reformasi hukum di bidang kehutanan telah memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan di Jawa Tengah untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengelolaan hutan.

Berbagai aturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, misalnya pengaturan mengenai hutan kemasyarakatan telah memberikan landasan yang lebih kuat pada pelaksanaan program perhutanan sosial, sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat di bidang kehutanan. Demikian pula dengan adanya perkembangan asas-asas hukum dan pengaturan mengenai keikutsertaan masyarakat di bidang kehutanan, berdasarkan hak dan kewajiban serta bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat, telah memperlihatkan bahwa basis pembangunan dan pengelolaan hutan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan peran serta masyarakat tersebut melalui desentralisasi dalam pengelolaan hutan, mengembangkan pengetahuan masyarakat sekitar hutan, mengembangkan hak penguasaan atas lahan hutan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan hutan. Dalam hal ini pelaksanaan program perhutanan sosial di Jawa Tengah yang dimulai sejak tahun 1986, sampai saat ini juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan asas-asas hukum dan pengaturan yang mendasarinya. Setelah dalam 11 tahun pelaksanaannya, maka sejak tahun 1997 perkembangan pelaksanaan program mengalami stagnasi karena berbagai permasalahan multidimensional di Indonesia yang juga sangat berpengaruh di bidang kehutanan, khususnya mengenai peran serta masyarakat di bidang kehutanan berdasarkan bentuk program perhutanan sosial.

(Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Kontrak Nomor :
028/P4T/DPPM/III/2003 tanggal 28 Maret 2003)

SUMMARY

THE PRINCIPLES OF LAW DEVELOPMENT ON THE SOCIAL FORESTRY PROGRAMME REGULATION FOR THE SUPPORT OF FOREST CONSERVATION IN CENTRAL JAVA (L. Tri Setyawanta.R, Budi Ispriyarso, Nanik Trihastuti : 2003, 70 p)

The social forestry programme, as the form of community participation in the forest development and management, there is a need to review for it's basic of rule. It's cause there is the development of principles of law and community participation regulation on the forest matter, as the basic of social forestry programme implementation. In such, there is a need to develops the efforts of the community participation in the forest matter, in the era of decentralization and local autonomy.

The aim of this research is to know how the efforts of development on the principles of law and the the rule of sosial forestry programme, based on community participation on the field of forest development and management for the support of forest conservation purpose.

The research method was yuridis-normatif approach, which used the secondary data was collected by library research. The sample was taken by using non random sampling. The research spesification was descriptive and data analysis was qualitative.

The Law N0 41 of 1999 concerning the forest as the form of law reformation in the field of forest, given community , especially around the forest in central java, a broad opportunity to participate on the forest development and management. Several impelementing it's rule, such a sosial forestry provisions provides more strong on the basic for the social forestry programme implementation as the form of community participation. In such, with the principles of law and

provision development of community participation based on the rights and duties and activities form where the community can doing, has shown that the basic of forest development and management can not separated with the existence of community around the forest. There fore, efforts needed to develop of community participation through the decentralization of forest management, to develops the traditional-forest related knowledge of community around the forest, develops the land tenure and capacity building in the forest management. With regard to the social forestry programme implementation in central java, it's has been started in 1986 until 1997. Since then, the progress of the programme under stagnate, cause the several multidimension problem in Indonesia, has impacted on the field of the forest, especially concerning community participation based on the form of social forestry programme.

(Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang Contract Number : 028/P4T/DPPM/III/2003, March 28, 2003)

PRAKATA

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat limpahan rahmatNya, maka laporan penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Penelitian yang berjudul Pengembangan Asas-Asas Hukum Dalam Pengaturan Program Perhutanan Sosial Untuk Menunjang Konservasi Hutan Di Jawa Tengah, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai program perhutanan sosial yang pengaturannya didasarkan pada asas-asas hukum yang telah mengalami perkembangan dan kemungkinan juga masih akan terus berkembang.

Setelah laporan penelitian ini disusun, tidak berarti bahwa permasalahan yang dikemukakan telah selesai pula pembahasannya, karena penulisan laporan ini tidak dapat terlepas dari kekurangan dan kelemahan serta kesalahan mengenai data dan fakta yang dideskripsikannya. Oleh karena itu masukan-masukan yang bermanfaat sebagai saran dan kritik akan kami terima dengan tangan terbuka, sebagai sarana untuk melengkapi laporan penelitian ini

Pada akhirnya, atas kesempatan ini dan bantuan semua pihak yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

Yth. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Yth. Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk pengembangan ilmu di Perguruan Tinggi

Semarang, 10 Nopember 2003

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.	i
Lembar Identitas dan Pengesahan	ii
Ringkasan dan Summary	iii
Prakata	vii
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Perumusan Masalah	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.	8
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.	13
3.1. Tujuan Penelitian.	13
3.2. Manfaat Penelitian	13
BAB IV : METODE PENELITIAN.	15
4.1. Metode Pendekatan.	15
4.2. Spesifikasi Penelitian.	16
4.3. Metode Penentuan Sampel.	16
4.4. Metode Pengumpulan Data.	17
4.5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.	17
4.6. Metode Analisis Data.	18

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	20
5.1. Perkembangan Asas-Asas Dan Pengaturan Mengenai Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan Sebagai Landasan Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial.	20
5.2. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengembangkan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan Melalui Pengembangan Asas-Asas Hukum Dan Pengaturan Program Perhutanan Sosial, Khususnya di Jawa Tengah.	39
5.2.1. Upaya-Upaya Untuk Mengembangkan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan	42
5.2.2. Pelaksanaan dan Pengembangan Asas-Asas dan Pengaturan Program Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah	54
5.3. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Konservasi (perlindungan) Hutan Dalam Kaitannya Dengan Program Perhutanan Sosial.	61
 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	 68
6.1. Kesimpulan.	68
6.2. Saran-Saran.	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penelitian :

Berdasarkan Pasal 1.b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebelumnya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan disebutkan bahwa hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Pengertian hutan saat ini sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut didasarkan pada penggunaan pendekatan secara ekologi, sehingga hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian sebelumnya lebih mencerminkan pendekatan administratif, karena adanya unsur penetapan dari Pemerintah untuk menentukan suatu ekosistem tertentu sebagai suatu hutan.

Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan peranan hutan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk disekitarnya (Kebijaksanaan PELITA V bidang Kehutanan, Tap MPR N0 II/MPR/1988 tentang GBHN). Demikian pula dalam pembangunan kehutanan, keikutsertaan masyarakat di

kawasan hutan dan sekitarnya, termasuk masyarakat transmigrasi kehutanan perlu untuk diberikan peluang dan ditingkatkan. (Kebijaksanaan PELITA VI bidang Kehutanan, Tap MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN).

Selanjutnya, hutan sebagai sumber daya dan lingkungan hidup harus didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta, penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. (Arah Kebijakan di Bidang Sumber daya dan Lingkungan Hidup, Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN).

Dalam kenyataan yang terjadi selama ini, pemanfaatan dan pengelolaan hutan akan menunjukkan adanya dua kepentingan yang berbeda. Disatu sisi terdapat kepentingan negara, yang tercermin dari kegiatan Perum Perhutani (sekarang menjadi Persero) dalam mengelola dan memanfaatkan hutan untuk kepentingan secara luas, dengan tetap menjaga kelestariannya. Sedangkan di sisi yang lain adalah adanya kepentingan masyarakat sekitar hutan atau masyarakat desa hutan yang memanfaatkan hutan untuk menunjang kehidupannya dan cenderung mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan.

Pada umumnya memang kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan masih relatif rendah, karena areal pertanian mereka terbatas, sehingga pendapatan perkapitanya kecil. Di samping itu sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan serta pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar, menyebabkan masyarakat desa hutan tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pertambahan jumlah penduduk tersebut juga mengakibatkan daya dukung lingkungan hutan menjadi berkurang kemampuannya.. Bagi masyarakat desa sekitar hutan, ketergantungan mereka terhadap hutan merupakan ketergantungan secara tradisional, dalam arti secara turun temurun dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Di dalam mengatasi dan memenuhi desakan kebutuhan hidupnya, masyarakat desa sekitar hutan berkecenderungan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Tindakan-tindakan tersebut misalnya adalah melakukan *pembibrikaan* tanah hutan yaitu membuka peladangan liar (perambahan hutan) untuk mendapatkan tanah garapan. Demikian pula melakukan penebangan kayu hutan secara liar untuk digunakan sendiri atau diperdagangkan. Di samping menggembalakan ternaknya secara liar di kawasan hutan dan melakukan pembakaran arang di dalam kawasan hutan, yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan.

Dengan demikian telah terjadi hubungan yang tidak serasi antara masyarakat desa sekitar hutan dengan Perum Perhutani yang mewakili kepentingan negara, sebagai akibat adanya kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sering kali timbul masalah dan konflik, sebagai akibat perbedaan kepentingan, karena pola hubungan antara negara dengan masyarakat desa sekitar hutan tidak berjalan pada landasan yang sama. Untuk menyelaraskan dua kepentingan yang berbeda tersebut, maka Perum Perhutani melakukan tindakan yang bersifat preventif maupun represif.

Tindakan preventif yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan merumuskan kembali konsep-konsep manajemen hutan melalui sarana hukum, berdasarkan pola pendekatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Perangkat hukum tersebut akan digunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan perubahan terhadap pola tingkah laku masyarakat desa sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan. Hal itu berarti bahwa hukum digunakan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap masyarakat desa sekitar hutan, agar tindakan-tindakannya terhadap hutan sesuai dengan nilai-nilai baru yang hendak dituju melalui perangkat hukum tersebut.

Upaya rekayasa sosial terhadap masyarakat desa sekitar hutan dilakukan melalui bentuk Program Perhutanan Sosial (*social forestry programme*), yang

dalam bentuk produk hukumnya pertama kali diwujudkan dengan SK. Menteri Kehutanan N0 228/Menhut-II/1988 tanggal 13 1988 Yo SK. Direksi Perum Perhutani N0. 602/KPTS/DIR/1988, Juli 1988. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan program perhutanan sosial Perum Perhutani adalah perhutanan sosial terbatas dikawasan hutan, yang merupakan program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestariannya (Pedoman Pelaksanaan Program, 1988 : 4).

Istilah "*perhutanan*" dalam perhutanan sosial berarti suatu tatanan sistem (rangkai) kegiatan pembangunan hutan, tanah, air dan masyarakatnya menurut tata nilai dan tata aturan tertentu, baik teknis, ekonomis, politis dan sebagainya melalui fungsi-fungsi manajemen tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian maupun pengawasannya. Sedangkan istilah "*sosial*" diartikan sebagai lawan dari komersial dan industrial, dimana di dalamnya terkandung makna "*low profite oriented*". Dengan demikian tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih banyak membina potensi masyarakat melalui kesadaran presepsi, kewaspadaan dan keswadaanyaannya, dalam rangka mendukung ekonomi pedesaan berskala kecil, medium dan otonom (Proceeding Pelatihan Perhutanan, 1989 : 34).

Dengan dilaksanakannya program perhutanan sosial, maka masyarakat desa sekitar hutan akan dapat dibina sebagai mitra sejajar di dalam pembangunan hutan atas dasar saling menguntungkan. Di samping program tersebut diharapkan mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Perum Perhutani, sekaligus dapat melindungi dan memperbaiki lingkungan hutan serta menjaga kelestariannya. Dengan demikian program tersebut merupakan salah satu upaya Perum Perhutani dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar hutan dan untuk menanggulangi masalah tekanan sosial ekonomi terhadap hutan.

Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat desa sekitar hutan dalam program perhutanan sosial bukan sekedar sebagai pekerja, tetapi juga mempunyai hak garap untuk mengelola tanaman tumpang sari sesuai dengan potensi dan petunjuk teknisnya. Sistem penggarapan dilakukan melalui kelompok tani hutan (KTH) sebagai wadah pembinaan anggota kelompok pelestari perhutanan sosial (KPPS), yang terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kesempatan untuk saling membantu dalam mengolah lahan, menangani pemasaran dan mempunyai kesempatan menabung untuk kegiatan sosial ekonomi. Oleh karena itu bimbingan untuk kelompok tani hutan merupakan prioritas khusus, yang dimaksudkan agar kerjasama yang terjalin tidak hanya sekedar dalam menggarap lahan, tetapi juga untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul.

Dengan demikian melalui program perhutanan sosial diarahkan untuk mengadakan perubahan terhadap pola hubungan segitiga antara Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan hutan. Perum Perhutani sebagai "*pemilik lahan*" dan masyarakat desa hutan sebagai "*penggarap lahan*" adalah dua subyek yang melakukan kerjasama. Sedangkan hutan sebagai "*lahan*" adalah obyek yang mengikat hubungan kedua pihak tersebut. Berdasarkan suatu surat perjanjian akan ditentukan bentuk hubungan kerjasama, cara menjaga dan menggarap lahan, apa yang dihasilkan lahan, hak pembagian masing-masing pihak dari hasil lahan, dan lain-lainnya.

Dalam pelaksanaan program perhutanan sosial yang dimulai melalui *pilot project* tahun 1986 sampai dengan tahun 1997, khususnya di Jawa Tengah yang berada dibawah pengelolaan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, terdapat beberapa kemajuan-kemajuan yang telah berhasil dicapai yaitu telah mulai dilaksanakannya teknik-teknik konservasi tanah, adanya peningkatan pendapatan dari para anggota kelompok tani hutan, adanya peningkatan keamanan hutan dari tekanan sosial

ekonomi masyarakat dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara kelompok tani hutan dengan Perum Perhutani sebagai pembina.

Di samping kemajuan-kemajuan yang telah berhasil dicapai, terjadi pula beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu masalah sosial, ekonomi, hukum, kebijakan, masalah ekologi dan masalah rendahnya partisipasi masyarakat. Demikian pula terjadinya reformasi disegala bidang di Indonesia, khususnya di bidang hukum sejak tahun 1998 telah mempengaruhi perkembangan pelaksanaan program tersebut.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah N0 62 tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah, akan memberikan pengaruh yang besar pada pengaturan program perhutanan sosial. Demikian pula dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah N0. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini, masyarakat hukum adat diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian pula berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah dapat menetapkan bahwa pengusahaan hutan pada wilayah hutan tertentu hanya diberikan pada masyarakat setempat atau kelompok masyarakat lain melalui koperasi.

Reformasi hukum di bidang kehutanan tersebut terus berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menggantikan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967. Undang-Undang yang baru ini dengan aturan-aturan pelaksanaannya telah mengacu pada semangat otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian reformasi hukum harus dilakukan pula terhadap pengaturan program perhutanan sosial, yang didasarkan pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan bidang kehutanan, yang disesuaikan dengan kondisi dan semangat

otonomi daerah. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mencari asas-asas hukum yang terkandung dalam pengaturan mengenai keikursertaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan bidang kehutanan, yang menjadi dasar dari pengaturan program perhutanan sosial. Demikian pula ditujukan untuk mengetahui pengembangan asas-asas tersebut dalam interaksinya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk kepentingan deregulasi program tersebut.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan asas-asas hukum dan pengaturan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, sebagai landasan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial ?.
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan asas-asas hukum dan pengaturannya untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, berdasarkan pelaksanaan program perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, untuk kepentingan konservasi hutan .
3. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan mengenai konservasi (perlindungan) hutan dalam kaitannya dengan program perhutanan sosial ?